

BAB I PENDAHULUAN

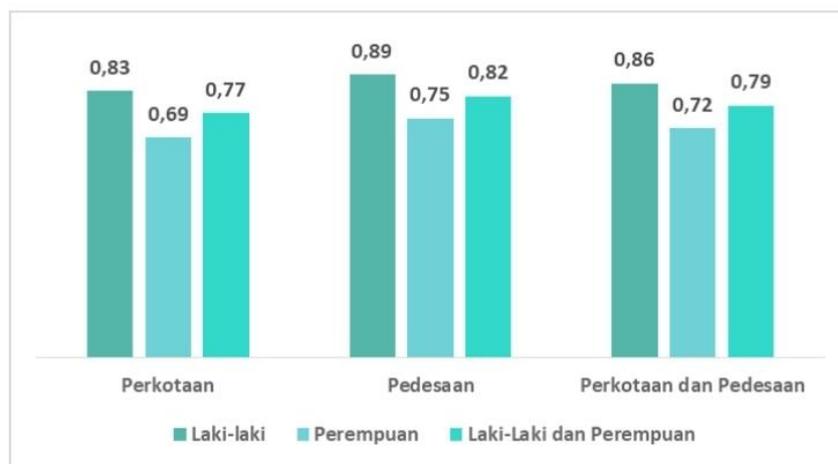
1.1 Latar Belakang

Anak adalah berkah yang diberikan kepada keluarga dan memiliki potensi untuk mendukung masa depan keluarga. John W. Whitehead menyatakan bahwa *“Children are the living messages we send to a time we will not see”*. Perspektif tersebut menunjukkan betapa pentingnya anak dalam mendukung masa depan sebuah keluarga. Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan emosional mereka. Perkembangan setiap anak unik dan banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah keterbatasan, termasuk keterbatasan fisik, mental, dan intelektual yang dimiliki oleh sebagian anak. Keterbatasan tersebut dapat menghambat aktivitas sosial yang dilakukan oleh sebagian anak.

Menurut John C. Maxwell, Anak dengan keterbatasan juga dikenal sebagai anak penyandang disabilitas (APD), yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual yang menghambat kemampuannya untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan oleh anak lain. Undang-undang tentang hak penyandang disabilitas secara tegas menetapkan dukungan dan hak-hak anak penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, anak penyandang disabilitas adalah setiap orang anak yang memiliki keterbatasan mulai dari keterbatasan fisik, intelektual, mental, dalam jangka waktu yang lama. Seorang anak penyandang disabilitas tentu akan menghadapi sejumlah tantangan ketika berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Berdasarkan bunyi dari undang-undang tersebut, peneliti berpendapat bahwa anak penyandang disabilitas seringkali menghadapi masalah yang menghambat aktivitasnya, mulai dari masalah fisik hingga psikologis. Dukungan lingkungan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian anak penyandang disabilitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap penyandang disabilitas. Pada survei data yang dilakukan pada tahun 2020, ditemukan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta, atau sekitar 5% dari populasi negara. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di provinsi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia 2020 menyebutkan ada 0.79% atau 650.000 anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia, dimana anak penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).



Gambar 1 Persentase Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia

(Sumber : Profil Anak Indonesia, 2020)

Melihat fenomena yang ada, yaitu tingkat penyandang disabilitas di Indonesia yang terus bertambah, pastinya memerlukan sebuah pelayanan rehabilitasi sosial yang dapat memberikan perubahan yang dilakukan secara intensif dan optimal dengan menyesuaikan hak yang diperoleh penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup yang meliputi, hak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas khususnya anak menghadapi tantangan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga diperlukan suatu metode peningkatan kemandirian dan kemampuan sosial anak di lingkungan masyarakat, meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa program untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh komunitas ini, termasuk kesulitan mengakses

pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai.

Salah satu cara untuk meningkatkan kondisi penyandang disabilitas adalah dengan memberikan layanan kepada mereka. Jenis layanan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang hak penyandang disabilitas atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial. Salah satu cara untuk menerapkan undang-undang tersebut adalah dengan menyertakan jenis layanan rehabilitasi sosial dalam kegiatan yang diselenggarakan secara profesional oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015, Kementerian Sosial Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial, termasuk rehabilitasi sosial. Anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan perhatian lebih dalam melakukan aktivitasnya untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin di masyarakat. Diperlukan proses rehabilitasi yang kompeten dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kemampuan anak penyandang disabilitas, tetapi banyak orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas tidak mengetahui program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas.

Menurut hak asasi manusia yang diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities* (UNCRP) pasal 7 tentang anak penyandang disabilitas, penyelenggara rehabilitasi sosial di masyarakat harus meminimalisir bentuk pemisahan dari kelompok penyandang disabilitas. Menurut UNCRP, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat meminimalisir pemisahan kelompok bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan kemampuan sosial bagi anak penyandang disabilitas. Pemerintah berpartisipasi dalam menjamin kontribusi terhadap penyetaraan hak bagi anak penyandang disabilitas dengan menerapkan hak-hak mereka melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendukung penyetaraan hak anak penyandang disabilitas.

Upaya pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas anak adalah dengan mendirikan organisasi pemerintah bernama Sentra Mulya Jaya, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lembaga tersebut menyelenggarakan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas, dan memiliki beberapa unit layanan, salah satunya adalah Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas (ULRS APD).

Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas Balai Melati Jakarta, yang terletak di Jakarta Timur, menyediakan layanan untuk meningkatkan kemampuan sosial anak penyandang disabilitas dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat dan mengawasi anak penyandang disabilitas. Sasaran layanan ULRS APD adalah anak penyandang disabilitas usia 2 hingga 18 tahun dengan semua jenis disabilitas dan keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Layanan yang diberikan ULRS APD termasuk terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku, dan fisioterapi untuk anak penyandang disabilitas, serta konsultasi, kelompok saling dukung, dan pelatihan untuk keluarga.

Penyandang disabilitas sangat membutuhkan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan sosial secara optimal dan efisien. Program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ini sangat menarik, karena melalui observasi awal peneliti, terdapat banyak kegiatan dan keseruan bersama anak penyandang disabilitas dan keluarga dengan anak penyandang disabilitas untuk melatih kemampuan dalam mengembangkan potensi diri bagi anak penyandang disabilitas. Contohnya adalah kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama keluarga dengan anak penyandang disabilitas, kegiatan semarak hari disabilitas internasional dengan penyuluhan, lomba, dan menyalurkan kreatif anak penyandang disabilitas dengan berbagai kegiatan.

Program rehabilitasi sosial bagi anak penyandang disabilitas tersebut dapat berjalan, tentunya memiliki jaringan yang berhubungan satu sama lain. Jaringan tersebut adalah organisasi. Perilaku organisasi yang berlangsung merupakan bagaimana proses untuk berinteraksi dengan memberikan makna apa yang terjadi pada saat proses interaksi tersebut berjalan. Menurut Gold Halber, komunikasi organisasi adalah aliran pesan dalam jaringan sifat-sifat yang saling terkait “*the*

message flow in a network of interdependent relations” (Fajar, 2019). Hubungan keterkaitan tersebut adalah untuk mengetahui makna dalam proses interaksi yang sedang berlangsung antara komunikator dan komunikan dalam sebuah organisasi, sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan mestinya.

Dalam melaksanakan program-program kegiatan tentunya memerlukan strategi komunikasi untuk menunjang keberhasilan dalam menjalankan program kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan pasti memiliki perencanaan yang dibuat oleh organisasi terkait. Organisasi membutuhkan perencanaan komunikasi dalam kondisi apapun. Strategi komunikasi sangat penting bagi organisasi manapun termasuk organisasi pemerintah yaitu ULRS APD agar siap untuk mengambil langkah-langkah dalam peristiwa krisis yang dapat mencegah pembentukan publisitas negatif dan konsekuensi negatif lainnya dalam sebuah organisasi.

Organisasi pemerintah ULRS APD sangat membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dalam menjalankan program rehabilitasi sosial. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa target penerima manfaat belum tercapai secara penuh, yang disebabkan oleh pergantian penerima manfaat bantuan rehabilitasi sosial setiap 6 bulan dan kurangnya media informasi seperti spanduk dan banner. Diperlukan strategi komunikasi yang tepat dalam menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas agar program tersebut dapat mencapai target penerima manfaat yang diinginkan.

Menurut pendapat peneliti, strategi komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengelola suatu organisasi. Hal ini karena strategi komunikasi akan membantu dalam mengatur tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, strategi komunikasi dapat membantu organisasi dalam mengatur kegiatan dan mengirimkan pesan yang tepat kepada penerima manfaat. Peneliti juga berpendapat bahwa strategi komunikasi yang efektif dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

Strategi komunikasi akan membuat perencanaan yang digunakan untuk memperlancar komunikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar

tujuan yang diinginkan dapat terlaksana. Keberhasilan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh organisasi sangat bergantung kepada strategi komunikasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Pada intinya strategi komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan, tujuan tersebut dapat tercapai jika strategi komunikasi dapat menunjukkan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi suatu permasalahan. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara taktis dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi (Effendy, 2006). Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti berpendapat bahwa strategi komunikasi pada sebuah organisasi memerlukan langkah-langkah agar tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui pendekatan dan perencanaan yang dilakukan secara fleksibel tergantung situasi dan kondisi dalam melaksanakan aktivitas komunikasi untuk melaksanakan suatu program kegiatan.

Komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok memiliki tujuan untuk memberikan perubahan sosial, perubahan sikap, perubahan pendapat, dan perubahan perilaku yang dapat mensosialisasikan nilai-nilai kepada masyarakat (Mulyana, 2007). Nilai-nilai yang disosialisasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar pesan yang disampaikan oleh organisasi terkait dapat dipahami dengan benar oleh khalayak.

Dalam mendukung pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, diperlukan langkah nyata dari semua pihak terkait. Langkah tersebut termasuk kontribusi terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui berbagai program yang dilakukan bersama-sama dengan menggunakan strategi yang tepat. Upaya tersebut dapat berupa pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas terutama anak, menyediakan layanan rehabilitasi bagi penerima manfaat, serta memberikan konsultasi kepada keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan komunikasi yang efektif agar upaya pemerintah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan melalui penggunaan strategi komunikasi yang tepat.

Peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi pemerintah tersebut dalam menjalankan program rehabilitasi sosial untuk anak penyandang disabilitas. Peneliti tertarik mengangkat tema ini, dikarenakan peneliti memiliki perhatian yang besar terhadap penyandang disabilitas terutama anak yang belum menerima manfaat rehabilitasi sosial, tentunya anak penyandang disabilitas tersebut memerlukan sebuah layanan rehabilitasi sosial yang diharapkan dapat memberikan perubahan serta perkembangan bagi para anak penyandang disabilitas.

Kebermanfaatan penelitian ini adalah, dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat khususnya di DKI Jakarta yang memiliki keluarga dengan anak penyandang disabilitas mulai dari 0-18 tahun agar mendapatkan informasi dan edukasi mengenai sebuah layanan rehabilitasi sosial bagi seorang anak penyandang disabilitas. Melalui rehabilitasi sosial seorang anak penyandang disabilitas diberikan materi berupa penguatan mental, pengembangan kemampuan, dan pengembangan kreativitas sehingga tidak dianggap sebagai manusia yang tidak produktif. Disamping itu di ajarkan untuk mampu menghadapi lingkungan masyarakat, keluarga dan sebagainya agar ketika mereka masuk dan bergabung dengan masyarakat, tidak ada pandangan negatif terhadap seorang anak penyandang disabilitas.

Peneliti memilih menggunakan judul yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu “*Strategi Komunikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus di Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas Balai Melati Jakarta)*”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya adalah “Bagaimana strategi komunikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas dalam mengimplementasikan program layanan rehabilitasi sosial bagi anak penyandang disabilitas?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

Tujuan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memahami strategi komunikasi secara spesifik yang digunakan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan program layanan rehabilitasi sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai keefektifan strategi komunikasi yang digunakan dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang potensial untuk perbaikan dalam pelaksanaan program.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan program sosial. Dengan memahami strategi komunikasi secara spesifik yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Dapat digunakan sebagai upaya mengedukasi dan pemenuhan informasi khususnya bagi orang tua dengan anak penyandang disabilitas agar mengetahui program yang diadakan oleh pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas serta memberikan pengetahuan mengenai dukungan sosial lembaga bagi anak penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta melalui program layanan rehabilitasi yang diberikan.

1.4.2 Secara Akademis

Secara akademis, manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana strategi komunikasi dapat digunakan untuk mengimplementasikan program layanan, dapat mendorong terjadinya diskusi dan pertukaran ide di kalangan akademisi dan praktisi serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian terkait.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang akan penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan topik, judul, dan isi dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisikan mengenai konsep-konsep dan teori penelitian serta kerangka penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB III Metodologi Penelitian.

Pada bab ini berisikan mengenai Subjek penelitian yang diteliti yaitu Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas (ULRS APD) Balai Melati Jakarta yang memiliki program dengan sasaran anak penyandang disabilitas dan keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat temuan penelitian yang didapatkan dari pengumpulan data di lapangan, wawancara dengan informan, dan pembahasan yang terkait dengan konsep penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat hasil kesimpulan ringkasan temuan dari penelitian serta saran yang disampaikan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian ini berisikan berbagai buku dan referensi sebagai acuan dalam penyusunannya.